

# TINJAUAN ATAS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN: STUDI PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BUTON

**Lia Hanifa**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,  
Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36 Baubau.  
*E-mail: ipa.hanifa@gmail.com*

---

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan atas akuntansi pertanggungjawaban anggaran studi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buton. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buton yang beralamat di Jalan Poros Wakoko-Lasalimu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Buton telah memenuhi syarat-syarat sistem akuntansi pertanggungjawaban, baik berupa struktur organisasi, anggaran, penggolongan biaya, sistem informasi dan sistem pelaporan biaya. Karakteristik akuntansi pertanggungjawaban di Dinas Kehutanan Kabupaten Buton terdiri dari identifikasi pusat pertanggungjawaban, standar tolak ukur kinerja, pengukuran kinerja yang berupa perbandingan realisasi dan anggaran, serta adanya penghargaan dan hukuman berdasarkan kebijakan.

**Kata kunci:** akuntansi, pertanggungjawaban, anggaran.

## Abstract

*The purpose of this research is to know the review of accountancy budget accountability at the Buton District Forestry Office. This research was conducted at Buton District Forestry Office located at Poros Wakoko-Lasalimu Street, Pasarwajo Sub-district, Buton Regency. The results of this study indicate that the Buton District Forestry Service has fulfilled the requirements of accounting system of accountability, whether in the form of organizational structure, budget, cost classification, information system and cost reporting system. Accounting characteristic of accountability in Buton District Forestry Office consists of identification of responsibility center, performance benchmark standard, performance measurement in the form of comparison of realization and budget, and the existence of reward and punishment based on policy.*

**Keywords:** accounting, accountability, budget.

*Lia Hanifa: Tinjauan Atas Akuntansi Pertanggungjawaban ...*

## 1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada Pemerintah Daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggung-jawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah.

Suatu organisasi besar seperti pemerintah daerah dapat dianggap sebagai suatu pusat pertanggung-jawaban. Pusat pertanggungjawaban tersebut dipecah-pecah lagi menjadi pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga kepada level pelayanan atau program, misalnya dinas-dinas dan sub-sub dinas. Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut biasanya disebut dengan istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD kemudian menjadi dasar perencanaan dan pengendalian anggaran serta penilaian kinerja pada unit yang bersangkutan. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah pemerintah daerah secara keseluruhan yang diberikan kewenangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana untuk Pemerintah Kabupaten Buton dikuasakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sedangkan pusat-pusat pertanggung-

jawaban (entitas akuntansi) berada pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor unit kerja daerah.

Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan pada pemikiran bahwa seorang manajer harus dibebani tanggung jawab atas prestasinya sendiri dan prestasi bawahannya. Konsep akuntansi pertanggung-jawaban menjadi pedoman departemen akuntansi untuk mengumpulkan, mengukur, dan melaporkan prestasi sesungguhnya. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *Good Government Governance* berkaitan dengan pertanggung-jawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah harus tepat waktu dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Pimpinan lembaga selaku pengguna-anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam akuntansi pertanggungjawaban setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kerjanya. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas fokus penelitian ini adalah bagaimana

*Lia Hanifa: Tinjauan Atas Akuntansi Pertanggungjawaban ...*

tinjauan atas akuntansi pertanggungjawaban anggaran studi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buton?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan atas akuntansi pertanggungjawaban anggaran studi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buton.

## 2. Metode Penelitian

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buton yang beralamat di Jalan Poros Wakoko-Lasalimu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton.

### Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2006:55) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sesuai dengan permasalahan yang dibahas maka populasi dalam penelitian ini adalah data anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buton.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2006:56). Sampel dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buton tahun 2013 dan 2014.

### Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat dan gambar. Dalam penelitian ini yang merupakan data kualitatif, yaitu berupa informasi atau penjelasan dari pimpinan dan pegawai mengenai sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban anggaran.
2. Data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka.

Dalam penelitian ini yang menjadi data kuantitatif yaitu berupa laporan realisasi anggaran.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan khusus untuk riset tertentu langsung dari objek penelitian, dengan melakukan wawancara mengenai penggunaan anggaran kepada pimpinan dan pegawai, yang dilakukan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buton.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari berbagai literature dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan ini sebagai landasan ilmiah yang bersifat teori dan memiliki relevansi dengan penelitian ini.

### Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data:

1. Penelitian Lapangan yaitu pengadakan penelitian langsung pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buton, yaitu:
  - a. Wawancara (*Interview*) dalam penelitian ini adalah wawancara langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buton, dan pegawai dibagian administrasi keuangan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan mengumpulkan informasi.
  - b. Dokumentasi, mengumpulkan data dan informasi berdasarkan dokumen dan kertas kerja yang berkaitan dengan akuntansi pertanggungjawaban pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buton.
2. Penelitian Perpustakaan yaitu pengamatan dengan menelaah buku-buku literatur serta karya tulis yang berkaitan dengan pembahasan, guna memperoleh landasan teori yang relevan dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan.

Lia Hanifa: Tinjauan Atas Akuntansi Pertanggungjawaban ...

### Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan dan menafsirkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai pengumpulan data, penyusunan dan analisis data sehingga dapat diketahui gambaran umum objek yang diteliti.

## 3. Pembahasan

### Anggaran

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan juga sebagai alat pengendalian. Suatu pengendalian biaya yang efektif ditunjang dengan adanya anggaran yang disusun sesuai dengan tingkat manajemen dalam organisasi. Dengan adanya susunan organisasi yang memiliki pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas, perusahaan dapat menetapkan pihak yang bertanggung jawab jika terjadi penyimpangan dalam anggaran. Tujuan penyusunan anggaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buton adalah untuk mengetahui jumlah dana yang dibutuhkan masing-masing bidang-bidang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi didalam menjalankan kegiatan operasional dan sebagai alat bantu didalam mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap penggunaan dana. Berikut ini adalah rencana pelaksanaan anggaran pada dinas Kehutanan Kabupaten Buton untuk tahun anggaran 2013 dan 2014 dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 1 Rencana Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2013 - 2014**

Uraian	2013	2014
Pendapatan	311.000.000	385.000.000
Belanja Tidak Langsung	6.327.506.000	6.799.992.000
Belanja Langsung	3.058.001.900	3.773.306.000

Sumber: Data Primer 2015

### Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali

Pimpinan memiliki wewenang sehingga dapat mengendalikan sesuatu yang berada di bawah kewenangannya. Oleh sebab itu, ada atau tidaknya seorang pimpinan dapat memengaruhi secara signifikan terhadap suatu biaya. Biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu biaya terkendali dan biaya tidak terkendali oleh pimpinan tersebut. Biaya terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh pimpinan pusat pertanggungjawaban tertentu dalam jangka waktu tertentu. Suatu biaya tidak akan dapat dipengaruhi secara penuh oleh seorang pemimpin. Biaya terkendali hanya dapat dipengaruhi secara signifikan dengan wewenang yang dimiliki oleh pimpinan tertentu.

Sedangkan biaya tidak terkendali merupakan biaya yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh seorang pemimpin pusat pertanggungjawaban tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buton telah melakukan pemisahan biaya terkendali (*controllable*) dan biaya tidak terkendali (*uncontrollable*). Contoh biaya terkendali seperti biaya perjalanan dinas dan biaya alat tulis kantor. Sedangkan contoh biaya tidak terkendali seperti biaya alokasi.

### Klasifikasi dan Kode Rekening

Salah satu syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban adalah adanya klasifikasi dan kode rekening. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Buton telah melakukan pengkodean rekening untuk setiap perkiraan

*Lia Hanifa: Tinjauan Atas Akuntansi Pertanggungjawaban ...*

dengan cukup memadai. Biaya-biaya yang terjadi dicatat untuk setiap tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi.

Klasifikasi dan kode rekening pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buton telah dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban yang ada didalam manajemen. Dengan demikian kode rekening yang ada telah mencerminkan kewenangan pusat pertanggungjawaban dan mampu memberikan informasi mengenai pusat biaya dan pimpinan yang bertanggungjawab atas terjadinya biaya tersebut. Pengklasifikasian kode rekening di Dinas Kehutanan Kabupaten Buton juga bertujuan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan.

**Tabel 2 Golongan dan Jenis Rekening Pada Masing-Masing Digit**

Golongan	Rekening
1	Aset Lancar
2	Investasi Jangka Panjang
3	Aset Tetap
4	Dana Cadangan
5	Aset Lainnya
6	Kewajiban Jangka Pendek
7	Kewajiban Jangka Panjang
8	Ekuitas Dana Lancar
9	Ekuitas Dana Investasi
10	Ekuitas Dana Cadangan

Sumber: Data Primer 2015

### Laporan Pertanggungjawaban

Berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor 7 tahun 2008 tentang Kedudukan Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Buton, maka Dinas Kehutanan merupakan salah satu perangkat daerah otonom yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kehutanan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahunan. Laporan Akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan

kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/kegiatan melalui indikator kinerja sebagaimana parameter yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Kehutanan Kabupaten Buton untuk menyelenggarakan kegiatan setiap tahun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton. Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Buton. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja, output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

### Target dan Realisasi Kinerja

Dinas Kehutanan Kabupaten Buton mengadakan pengukuran capaian kinerja pada kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar belanja pegawai. Berdasarkan alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah menurut Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buton sampai 31 Desember 2013 dapat di uraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013**

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Tidak Terealisasi	%
Belanja Tidak Langsung	6.327.506.000	6.089.616.498	96,24	237.889.502	3,76
Belanja Pegawai	6.327.506.000	6.089.616.498	96,24	237.889.502	3,76
Belanja Langsung	3.058.001.900	2.990.127.786	97,78	67.874.114	2,22
Belanja	820.948.000	800.939.000	97,56	20.009.000	2,44

*Lia Hanifa: Tinjauan Atas Akuntansi Pertanggungjawaban ...*

Pegawai					
Belanja	1.685.253.900	1.648.631.786	97,83	36.622.114	2,17
Barang Jasa					
Belanja	551.800.000	540.557.000	97,96	11.243.000	2,04
Modal					
<b>JUMLAH</b>	<b>9.385.507.900</b>	<b>9.079.744.284</b>	<b>96,74</b>	<b>305.763.616</b>	<b>3,26</b>

Sumber: Data Primer 2015

Dinas Kehutanan Kabupaten Buton menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran sesuai rencana strategi dimana capaian keuangan pada Belanja Tidak Langsung yakni Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp6.089.616.498,00 atau 96,24% sisanya yang tidak terealisasi sebesar Rp237.889.502,00 atau 3,76% Sedangkan untuk Belanja Langsung yakni Belanja Pegawai sebesar Rp800.939.000,00 atau 97,56%, Belanja Barang Jasa sebesar Rp1.648.631.786,00 atau 97,83% sedangkan belanja modal sebesar Rp540.557.000 atau 97,79 % dan sisa dari penggunaan anggaran yang tidak terealisasi untuk belanja langsung yaitu sebesar Rp67.874.114,00 atau 2,22%.

Hambatan dan kendala yang terjadi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan memang cukup kompleks karena sektor kehutanan sangat bersentuhan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan lahan dan kebutuhan kayu serta hasil hutan lainnya, sehingga banyak dijumpai kegiatan ilegal berupa perambahan hutan, ilegal logging, dan atau pemanfaatan hasil hutan yang tidak melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku, akibatnya terjadilah lahan kritis yang berdampak pada penurunan produktifitas hutan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Sangat disadari bahwa terjadinya tingkat pengrusakan kawasan hutan yang begitu tinggi tersebut karena belum optimalnya kegiatan pengendalian dan pengawasan serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung serta tingkat kemampuan SDM aparat yang belum memadai.

Di samping itu sistem perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi acuan perencanaan di daerah masih dirasa sulit

untuk diimplementasikan dengan perencanaan pembangunan di daerah termasuk perencanaan pada setiap sektor. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dan dicatat sebesar selisih lebih/kurang selama satu periode pelaporan. Selanjutnya berdasarkan alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah menurut Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buton sampai 31 Desember 2014 dapat diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014**

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Tidak Terealisasi	%
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>6.799.992.000</b>	<b>6.289.734.319</b>	<b>92</b>	<b>510.257.681</b>	<b>8</b>
Belanja Pegawai	6.799.992.000	6.289.734.319	92	510.257.681	8
<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.773.306.000</b>	<b>3.726.764.284</b>	<b>99</b>	<b>46.541.716</b>	<b>1</b>
Belanja Pegawai	945.225.000	935.160.000	99	10.065.000	1
Belanja Barang Jasa	2.223.267.000	2.187.031.684	98	36.235.316	2
Belanja Modal	604.814.000	604.572.600	99	241.400	1
<b>JUMLAH</b>	<b>10.573.298.000</b>	<b>10.016.498.603</b>	<b>95</b>	<b>556.799.397</b>	<b>5</b>

Sumber: Data Primer 2015

Dinas Kehutanan Kabupaten Buton realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran sesuai rencana strategi dimana capaian keuangan pada Belanja Tidak Langsung yakni Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp6.289.734.319,00 atau 92% sisanya yang tidak terealisasi sebesar Rp510.257.681,00 atau 8% dan Belanja Langsung yakni Belanja Pegawai sebesar Rp935.160.000,00 atau 99%, Belanja Barang Jasa sebesar Rp2.187.031.684,00 atau 98% sedangkan belanja modal sebesar Rp604.572.600,00 atau 99%. dan sisa dari penggunaan anggaran yang tidak terealisasi untuk belanja langsung yaitu sebesar Rp46.541.716,00 atau 1%.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan adalah (1) Masih kurangnya koordinasi baik lintas sektor maupun intern sektor dan instansi terkait sehingga terkesan masih ada

*Lia Hanifa: Tinjauan Atas Akuntansi Pertanggungjawaban ...*

kegiatan yang tumpang tindih dan belum sinergi dengan program instansi lain; (2) Tingkat kerusakan hutan masih cukup tinggi, illegal logging, penyerobotan kawasan, hal ini disebabkan karena masyarakat yang masih sebagian besar menggantungkan hidupnya disektor pertanian, serta pemanfaatan hasil hutan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, yang berdampak pada makin meluasnya lahan kritis dan menurunnya kualitas lingkungan hidup; (3) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparat terutama terbatasnya tenaga teknis sehingga belum mampu untuk menghadapi perkembangan dinamika masyarakat; (4) Menurunnya kinerja aparat akibat tidak ditunjang dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai; (5) Masih kurangnya lapangan kerja diluar sektor kehutanan yang dapat memberikan pendapatan yang banyak bagi masyarakat yang berdomisili disekitar hutan; dan (6) Tenaga pengawasan dan pengamanan hutan dan hasil hutan masih kurang dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan.

**Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran**

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu tipe informasi akuntansi manajemen. Akuntansi pertanggungjawaban memfokuskan terhdap pembagian wewenang kepada setiap bidang yang bertanggung jawab. Akuntansi pertanggungjawaban berperan sebagai alat pengendalian anggaran dengan menghubungkan penggunaan anggaran dan pertanggung jawaban anggaran. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian dalam suatu instansi memerlukan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Setiap pusat pertanggungjawaban selalu menetapkan target-target operasional dan anggaran. Dengan membandingkan realisasi dan dengan anggaran, seorang pimpinan pusat pertanggungjawaban dapat mengetahui apakah pengendalian biaya telah berjalan

dengan baik dan telah menggunakan biaya secara efisien.

Melalui akuntansi pertanggungjawaban, setiap penggunaan anggaran dikelompokkan dan dilaporkan untuk tiap bidang atau yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dengan demikian, pimpinan dapat melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengeluaran anggaran. Selain itu, penggunaan anggaran juga harus dilaporkan dan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini dapat membantu manajemen dalam melakukan pengendalian anggaran dengan menganalisis penyimpangan yang terjadi. Laporan pertanggungjawaban dapat digunakan sebagai tolak ukur penilaian kinerja instansi, pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengendalian anggaran harus dilakukan secara berkala dan pimpinan instansi menerima laporan pertanggungjawaban dari setiap bidang. Dengan demikian, akuntansi pertanggungjawaban mendorong pimpinan untuk mencapai tujuan pengendalian.

Laporan pertanggungjawaban juga dapat menentukan prestasi dari setiap bidang melalui sistem akuntansi pertanggungjawaban hasil penilaian kinerja instansi yang baik akan diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat dan promosi jabatan terhadap pegawai begitu pula sebaliknya apabila penilaian kinerja instansi yang kurang baik akan berakibat terhadap kenaikan pangkat pegawai dan promosi jabatannya.

**4. Simpulan**

Simpulan penelitian ini bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Buton telah memenuhi syarat-syarat sistem akuntansi pertanggungjawaban, baik berupa struktur organisasi, anggaran, penggolongan biaya, sistem informasi dan sistem pelaporan biaya. Karakteristik akuntansi pertanggungjawaban di Dinas Kehutanan Kabupaten

*Lia Hanifa: Tinjauan Atas Akuntansi Pertanggungjawaban ...*

Buton terdiri dari identifikasi pusat pertanggungjawaban, standar tolak ukur kinerja, pengukuran kinerja yang berupa perbandingan realisasi dan anggaran, serta adanya penghargaan dan hukuman berdasarkan kebijakan.

**Daftar Pustaka**

Anthony, Robert N, dan Govindarajan, Vijay. 2005. Sistem Pengendalian Manajemen, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Arif Bahtiar, Muchlis, dan Iskandar, 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.

Blocher, Edward J Chen, Kung H. Cokins, Gary dan Thomas W. Lin. 2007. *Cost Managemen Manajemen Biaya Penekanan Strategis*, Jakarta: Salemba Empat.

Darise, Nurlan. 2008. Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Cetakan Kedua. Gorontalo. Indeks.

Hansen dan Mowen. 2009. Akuntansi Manajerial. Jakarta: Salemba Empat.

Hongren, Charles T. dan Datar. 2005. Pengantar Akuntansi Manajemen, Terjemahan Moh. Badjuri dan Kusnedi Edisi VI. Jakarta: Salemba Empat.

L.M. Samryn. 2001. Akuntansi Manajerial Suatu Pengantar. Jakarata: Rajawali Pers.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

Meliala, Tulis, S. dkk. 2011. Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen (Konsep, Manfaat dan Rekayasa) Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.

Munandar. 2001. *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, dan Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Nafarin. 2000. Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.

Nur Cahyani, Nur Wawiyah. 2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah Pasal 133 dan 132